

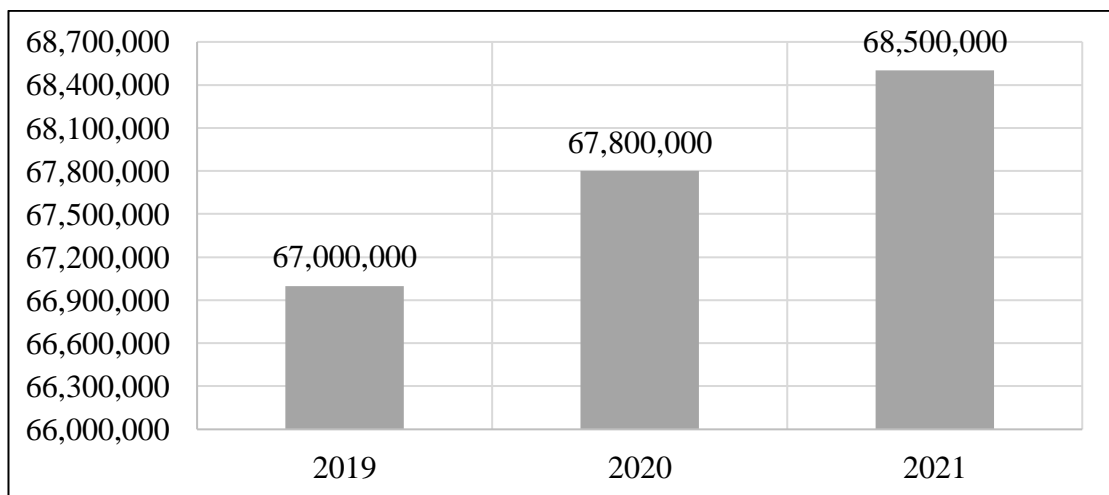
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang mempunyai permasalahan tentang sampah, begitu juga Negara maju dan Negara berkembang lainnya. Sampah adalah objek yang tidak lagi mempunyai nilai dan fungsi untuk seseorang sehingga dilakukan pembuangan.

Tabel 1. 1 Jumlah Sampah di Indonesia Tahun 2019-2021 (ton)



Sumber: Badan Pusat Statistika, Telah Diolah Kembali (2022)

Pada tahun 2020, Indonesia telah menghasilkan sampah sebesar 67,8 juta ton sesuai dengan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Artinya, 270 juta masyarakatnya memproduksi kurang lebih 185.753 ton sampah setiap hari ataupun masing-masing masyarakat bisa memproduksi kurang lebih 0,68 kilogram sampah setiap hari. Berdasarkan tahun 2018 dengan 267 juta warga sudah menghasilkan sampah sebanyak 64 juta ton, lalu naik ke angka 67 juta

ton untuk tahun 2019, dan 67,8 juta ton sejalan naiknya populasi warga pada tahun 2020.

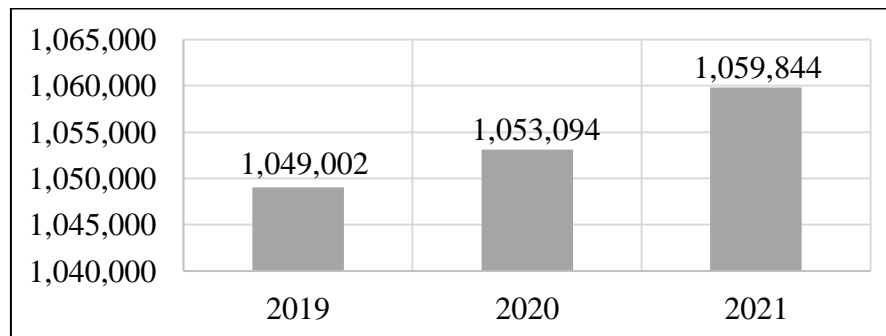
Setiap tahunnya, kuantitas sampah tersebut selalu mengalami peningkatan. Gunungan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi hasil dari banyaknya sampah yang dihasilkan setiap harinya, sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, namun juga menambahnya gas metana yang diproduksi dari sampah tersebut. Di sisi lain, daya tampung TPA semakin lama akan berkurang karena jumlah sampah yang diproduksi tidak sejalan dengan besarnya lahan yang tersedia di TPA. Ketersediaan lahan semakin lama akan berkurang karena dimanfaatkan secara berkala, tetapi belum selaras dengan bertambahnya besaran lahan untuk pembuangan. Sehingga masalah tersebut dapat diatasi dengan menciptakan kegiatan Bank Sampah.

Bank sampah merupakan kegiatan yang mempunyai tugas dan kegunaan untuk mengelola sampah dari warga serta bisa membawa pengaruh ekonomi untuk warga dengan sistem setoran sampah yang memiliki nilai ekonomis lalu mendaur ulang dan ditukarkan dengan rupiah. Latar belakang program ini adalah hasil sampah nasional sebesar 60% asalnya dari sampah domestik, sehingga perlu dilakukan pengelolaan mulai dari sektor rumah tangga. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), negara Indonesia memiliki kurang lebih 10 ribu bank sampah dan sudah berkontribusi sebesar 1.7% untuk pengelolaan sampah nasional.

Masalah sampah adalah topik darurat untuk seluruh kota di Indonesia, salah satunya Provinsi Jawa Tengah yang memiliki populasi sebanyak 36.516.035 jiwa pada September 2020 berdasarkan Sensus Penduduk 2020 Jawa Tengah. Sehingga sampah adalah *output* dari aktivitas seseorang secara domestik dan aktivitas industri.

Mendirikan bank sampah pada tiap daerah di Jawa Tengah merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam upaya menangani sampah di Jawa Tengah. Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang mana merupakan daerah yang tengah aktif dalam mendirikan bank sampah guna menangani masalah sampah melalui pemberdayaan masyarakat. Ditinjau dari tabel 1.2 mengenai proyeksi penduduk Kabupaten Semarang tahun 2019-2021, daerah ini selalu mengalami peningkatan kepadatan penduduk.

Tabel 1. 2 Proyeksi Penduduk Kabupaten Semarang 2019-2021 (jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Semarang, Telah Diolah Kembali (2022)

Banyaknya populasi penduduk di Kabupaten Semarang yang bisa memproduksi sampah sampai 520 ton setiap hari, sedangkan TPA Blondo memiliki kapasitas 170 ton sampah setiap hari dengan besar lahan kurang lebih 5 hektare

menurut laman resmi Sistem Informasi Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang <http://dlh.semarangkab.go.id/>.

Konsep implementasi bank sampah yakni mengajak warga untuk membuat kelompok, membuat pemisahan, atau membuat kategori sampah. Sehingga dapat menjadi inovasi penyelesaian untuk mengajak warga untuk memisah sampah. Lalu, upaya ini juga menghasilkan rupiah lalu warga diedukasi untuk melakukan penilaian sampah menurut jenis dan nilainya sehingga warga memiliki semangat untuk melakukan pengkategorian sampah.

Akhirnya, warga bisa mengubah budaya sikap membuang sampah serta meringankan beban pemerintah untuk menyelesaikan masalah sampah karena sampah secara keseluruhan tidak langsung dibuang ke TPA. Perlu diingat bahwa menciptakan lingkungan nyaman, sehat, dan tidak kotor adalah tanggung jawab seluruh warga bukan dari pemerintah semata.

Penjelasan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yakni meningkatkan populasi warga serta siklus konsumsi warga yang berganti bisa menyebabkan naiknya kuantitas dan bervariasinya jenis sampah. Pengelolaan sampah selama ini dilaksanakan masih belum berdasarkan wawasan lingkungan yang baik dari segi teknis ataupun prosedur manajemen sampahnya. Maka bisa membawa pengaruh yang buruk untuk kesehatan warga dan alam.

Adanya peraturan lain, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 14 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, menginstruksikan

Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berupaya untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan warga dalam rangka melaksanakan manajemen untuk mengurangi sampah dan menangani sampah. Aktivitas tersebut dilaksanakan menurut prosedur 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan menangani sampah yang dilaksanakan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, serta memproses tahap akhir.

Salah satu kabupaten yang memberdayakan warga melalui bank sampah, yakni Kabupaten Semarang yang terdaftar memiliki 161 bank sampah dalam rangka upaya menyelesaikan masalah sampah. Menurut data bank sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dapat dilihat beberapa hal, yakni hasil sampah domestik satu tahun adalah 718.685 m³ dan per hari adalah 1.969 m³. Sesuai dengan Laporan Utama Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Semarang 2018, volume sampah yang ditangani ataupun sampah yang dibuang ke TPA selama setahun yakni 150.885 m³, sedangkan kuantitas hasil sampah domestik setahun yakni 718.685 m³. Sehingga dapat terlihat bahwa sampah yang ditangani ataupun dibuang ke TPA masih belum maksimal. Maka dilakukan perhitungan untuk melihat volume penyumbangan sampah ke TPA disandingkan dengan volume hasil sampah domestik selama setahun hasilnya adalah hanya mencapai 20% sampah yang ditangani atau dibuang ke TPA.

Penambahan *volume* sampah di Kabupaten Semarang pada bulan Maret 2020 yang berbeda dengan bulan sebelumnya, disebutkan pada laman resmi Sistem Informasi Lingkungan Hidup <http://dlh.semarangkab.go.id/>. Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Semarang mengevaluasi hal tersebut yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat berada di rumah.

Pada bulan Maret 2020 menurut Kepala Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang terdapat volume sampah yang mencapai 5.417 ton, dibandingkan bulan Februari yang hanya 5.160 ton, artinya meningkat sebesar 6,05%. Sampah domestik merupakan sampah yang paling banyak karena adanya kebijakan belajar dari rumah dan pekerja yang WFH. Sehingga diperlukan upaya yang masif untuk menangani masalah pengelolaan sampah, antara lain ditambahkan armada yang mengangkut sampah, menambah TPS, menambah pekerja kebersihan, dan edukasi serta memberdayakan warga dengan mendirikan bank sampah.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Semarang (SILOPAH), terdapat volume sampah yang dikelola Bank Sampah di Kabupaten Semarang pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 total sampahnya adalah 12.964 kilogram, lalu tahun 2021 adalah 61.731 kilogram. Artinya, bank sampah memberikan sumbangsih untuk mengelola sampah karena adanya pengolahan dan upaya pengurangan di lingkungan rumah tangga sebelum dibuang ke TPA.

Pemerintah Daerah melalui DLH Kabupaten Semarang memberikan dukungan berdirinya bank sampah untuk menyelesaikan masalah sampah. Sejak tahun dimulainya bank sampah yaitu 2013 ada 161 bank sampah, namun terdapat 45 yang tidak aktif sehingga hanya terdapat 116. Hal tersebut karena belum maksimalnya keikutsertaan warga dan kesadarannya untuk mengelola sampah. Sampai tahun 2022 ini telah terdaftar 161 bank sampah, 1 bank yang merupakan

induk, 5 TPS 3R, serta 1.741 warga yang mengurusnya. Peran serta atau partisipasi masyarakat yang masih sedikit dan kian menurun, dapat menimbulkan permasalahan keberlanjutan dalam pengelolaan sampah di bank sampah. Padahal pada kegiatan bank sampah, masyarakat akan mendapatkan pengaruh dan manfaat yakni berupa kebiasaan baru pada masyarakat, kebersihan lingkungan dan semakin berdaya.

Tingkat keterlibatan warga mempunyai pengaruh yang maksimal terhadap kesuksesan aktivitas bank sampah. Pemikiran bahwa manusia merupakan sumber yang strategis adalah definisi dari pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Maka dari itu, pembangunan merupakan usaha terencana dalam rangka meningkatkan potensi dan mengerahkan minat masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan mengenai segala hal yang memiliki dampak bagi mereka dan mencoba mempromosikan kapasitas manusia, karena pembangunan berbasis pada masyarakat merupakan pemberdayaan yang mengarah pada kemandirian masyarakat. Dengan begitu, dimensi partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Namun, partisipasi disini tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai obyek, tetapi juga sebagai subyek yang menentukan jalannya dalam pembuatan keputusan dan proses perencanaan pembangunan (Aprillia Theresia et al., 2014).

Mendorong masyarakat supaya berdaya dalam mengelola sampah, diperlukan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat karena hal tersebut akan mempengaruhi jalannya program bank sampah. Hal ini juga dilatarbelakangi bahwa pembangunan bertujuan untuk

menghasilkan individu-individu yang peka terhadap keadaan yang akan terjadi, masalah yang sedang terjadi dan yang akan terjadi (Aprillia Theresia et al., 2014). Maka dari itu, dalam rangka mutu kehidupan masyarakat yang lebih baik dibentuk bank sampah sebagai alternatif guna mengatasi masalah dengan kemampuan sendiri.

Salah satu bank sampah yang berada di Kabupaten Semarang adalah Bank Sampah Kencana yang terletak di Perumahan Griya Argo Kencana, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Bank sampah yang diketuai oleh Ibu Suci Sri Riani ini telah beroperasi sejak tahun 2019 dan kegiatannya dilakukan setiap hari minggu di minggu ke-4. Bank sampah ini awalnya dibentuk dalam rangka mengedukasi masyarakat sekitar, dari anak kecil hingga orang dewasa supaya memiliki kesadaran dalam memilah sampah. Dimana, kegiatan memilah sampah ini dapat membantu dalam meminimalisir sampah yang masuk ke TPA dan supaya sampah yang masuk ke TPA hanya tersisa residu saja.

Akan tetapi, pada Bank Sampah Kencana masih terdapat beberapa masalah dalam kegiatannya. Permasalahan yang ada di Bank Sampah Kencana adalah jumlah nasabah yang menabung berbeda-beda tiap bulannya dikarenakan keaktifan masing-masing nasabah yang berbeda pula. Selain itu, jumlah nasabah yang ada di Bank Sampah Kencana terhitung masih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah nasabah lain pada bank sampah di wilayah Kabupaten Semarang, yaitu hanya sebanyak 25 nasabah yang terdaftar. Padahal di Perumahan Griya Argo Kencana memiliki *catchmen area* sebanyak 30 kartu keluarga, di mana satu kartu keluarga terdapat lebih dari 1 anggota keluarga yang apabila dijumlahkan maka

jumlahnya jauh di bawah nasabah yang telah terdaftar. Hal tersebut mencerminkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah untuk bergabung dalam kegiatan pembangunan berbasis masyarakat di Bank Sampah Kencana.

Masalah selanjutnya yang dihadapi oleh Bank Sampah Kencana adalah terdapat masyarakat sekitar Bank Sampah Kencana yang merasa tidak mau kerepotan untuk mengikuti kegiatan bank sampah. Kesadaran warga yang masih rendah terhadap kegiatan bank sampah tersebut dinilai berasal dari status ekonomi warga yang rata-rata merupakan warga kalangan menengah ke atas. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Eka sebagai staff Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang pada saat pra-penelitian bahwa:

“Masyarakat di sini kerepotan jika harus mengumpulkan sampah dan ikut kegiatannya. Apalagi masyarakat perumahan kebanyakan statusnya menengah ke atas mbak, pada sibuk jadi mereka lebih memilih membayar tukang sampah daripada ikut kegiatan bank sampah” (Wawancara Hari Kamis, 13 Januari 2022).

Padahal pembangunan merupakan upaya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang belum baik atau kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi (Aprillia Theresia et al., 2014). Maka dari itu, status ekonomi menengah ke atas bukan menjadi suatu batasan untuk melakukan pembangunan terhadap kehidupan bermasyarakat.

Fasilitas yang dimiliki oleh bank sampah dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan juga masih kurang memadai, ditinjau dari kegiatannya yang dilakukan di garasi salah satu rumah warga dan alat yang dimiliki hanya timbangan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang. Setelah diuraikan pada latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai pembangunan berbasis masyarakat dalam upaya pengembangan bank sampah Kencana.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas adalah sebagai berikut:

Bagaimana pengelolaan bank sampah berbasis masyarakat pada Bank Sampah Kencana, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengelolaan bank sampah berbasis masyarakat pada Bank Sampah Kencana, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Administrasi Publik di masa yang akan datang. Serta menjadi pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain, khususnya mengenai pembangunan berbasis masyarakat dalam upaya pengembangan bank sampah dalam melakukan penelitian.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai pengelolaan bank sampah berbasis

masyarakat pada bank sampah dengan tujuan menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan membantu dalam pengelolaan sampah serta pendataan sampah secara *real time* di Kabupaten Semarang. Serta dapat dijadikan saran dan masukan kepada dinas terkait untuk perkembangan kebijakan di masa depan sehingga partisipasi masyarakat dan penanganan masalah pengembangan atau bank sampah di Kabupaten Semarang semakin optimal.

- b. Bagi Masyarakat Kabupaten Semarang, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan mengenai pembangunan berbasis masyarakat dalam mengelola sampah melalui kegiatan bank sampah guna menciptakan manfaat ekonomis dari sampah dan dalam mengatasi masalah lingkungan, serta meningkatkan *awareness* masyarakat pada sampah rumah tangga.
- c. Bagi Peneliti, penelitian ini memperluas wawasan peneliti dan menyadarkan akan pengelolaan dan pemilahan sampah rumah tangga.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Referensi yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian dengan topik pembangunan berbasis masyarakat pada bank sampah menggunakan rujukan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Pertanyaan Penelitian	Teori	Data Unit	Metode	Temuan
1.	Darmawan dan Tahyudin, 2019	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Sakura Kelurahan Talang Kelapa Palembang	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Sakura Kelurahan Talang Kelapa, Palembang.	Teori Cohen dan Uphoff mengenai partisipasi masyarakat.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang.	Kualitatif melalui pendekatan fenomenologis.	Ada empat kategori mengenai partisipasi di penelitian ini yaitu, langkah mengambil keputusan; melaksanakan; mengambil manfaat; dan penilaian. Lalu, mengajak kolega; tetangga; pengurus bank sampah yang supel bisa membawa pengaruh positif kepada warga untuk terlibat.

2.	Amalia, 2020	Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat Pada Program Bank Sampah di Kota Yogyakarta.	Mengapa partisipasi masyarakat untuk menjadi nasabah bank sampah masih rendah.	Faktor faktor yang mempengaruhi partisipasi dan keputusan masyarakat.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Kualitatif deskriptif.	Ada sekitar 14.6% dari 129.252 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi anggota bank sampah di Kota Yogyakarta pada penelitian ini. Jumlah terkecil adalah Kecamatan Gedongtengan dan terbesar adalah Kecamatan Mergangsan serta Jetis. Tidak maksimalnya wawasan tentang pengelolaan sampah, tidak adanya rasa sadar dan motivasi diri, lalu penghasilan yang tidak kompetitif menjadi inti faktor yang membatasi partisipasi.
3.	Istanto et al., 2021	Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Bank Sampah (Studi Kasus	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Bank Sampah	Dimensi partisipasi oleh Mandy Wilson dan Pete Wilde.	BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Bandung, Kementrian	Kualitatif deskriptif.	Dimensi Pengaruh direfleksikan lewat terlibatnya wakil kelompok di rapat berkala dalam penelitian ini. Lalu Dimensi Inklusivitas direfleksikan lewat transparansi BSWM pada warga

		Pada Kelompok Masyarakat Pengelola dan Nasabah Bank Sampah Warga Manglayang RW. 06 Kecamatan Cibiru, Kota Bandung).	Wargi Manglayang.		LHK (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).		yang terlibat. Lalu Dimensi Komunikasi direfleksikan lewat siklus koordinasi BSWM secara tatap muka dan melalui WhatsApp. Kemudian Dimensi Kapasitas direfleksikan lewat adanya harapan warga untuk terlibat sejalan dengan kemampuan dan kemauan serta melakukan sejumlah diklat untuk pengembangan sumber daya. Kesimpulannya, yaitu partisipasi warga dalam pengaturan bank sampah Warga Manglayang bisa direfleksikan lewat empat dimensi partisipasi.
4.	Burhanuddin et al., 2021	Partisipasi Masyarakat Dalam Keberlanjutan Pengelolaan Bank Sampah di Desa Semamung.	Bagaimana partisipasi masyarakat di Desa Semamung yang berperan penting pada keberlanjutan bank sampah yang membantu	Cara menumbuhkan partisipasi masyarakatoleh Notoatmodjo dan Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat.	Bumdes Sahabat dan bank sampah Desa Semamung.	Deskriptif kualitatif.	Terlihat belum maksimalnya partisipasi warga Desa Semamung untuk pengelolaan bank sampah di penelitian ini, karena besaran anggota keluarga; sumbangsih yang disuguhkan pengelola bank sampah untuk warga dalam mengambil keputusan; level aktifnya warga dalam pemberian sosialisasi; <i>gender</i> ; umur; serta wawasan warga juga punya

			mengelola sampah di desa Semamung.				dampak pada level partisipasi dalam keberlangsungan manajemen Bank Sampah Sahabat di Desa Semamung.
5.	Sekito, T., Matsuyama, A., Prayogo, T. B., dan Dote, 2020	<i>Factors influencing the period of participation in a waste bank system in Malang City, Indonesia.</i>	Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada bank sampah di Kota Malang Indonesia.	<i>Multiple-regression model.</i>		Kuantitatif.	Hasil penelitian ditemukan bahwa banyak responden frustrasi dengan volume item yang membutuhkan pemisahan. Hal tersebut dilatarbelakangi beban yang terkait dengan aktivitas bank sampah menyebabkan ketidakaktifan peserta. Peserta yang tidak terbiasa dengan kebiasaan memilah sampah cenderung berpartisipasi dalam waktu yang lebih singkat.
6.	Raharjo et al., 2017	<i>Community-based solid waste bank program for municipal solid waste management improvement in Indonesia: a case study</i>	Bagaimana capaian dan hambatan pengelolaan sampah melalui program bank sampah.	<i>SWOT Analysis.</i>	Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Republik Indonesia, BPS Kota	Penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif.	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian kegiatan daur ulang jauh lebih rendah dari target nasional dan potensi daur ulang sampah kota. Kegiatan daur ulang yang sebenarnya hanya mengelola 5% dari total timbulan MSW dibandingkan dengan target nasional 20% dan potensi daur ulang 83%. Sedangkan program

		<i>of Padang city.</i>			Padang, Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia.		bank sampah (SW bank) yang didukung Kementerian Lingkungan Hidup hanya mengelola 0,05%.
--	--	------------------------	--	--	---	--	---

Sumber: Peneliti, 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan bank sampah berbasis masyarakat pada Bank Sampah Kencana, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tema yang sama yaitu berkaitan dengan Bank Sampah. Sedangkan untuk perbedaan pada penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada situs, waktu penelitian, serta kekhususan terhadap pembangunan berbasis masyarakat. Dari adanya penelitian-penelitian dengan fokus yang sama di atas dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi dalam melakukan penelitian ini nantinya. Selain itu juga, untuk menunjukkan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1.5.2 Administrasi Publik

Selain memiliki arti ketatausahaan, administrasi yakni langkah yang selalu bergerak untuk menggapai tujuan melalui komunikasi dan kolaborasi bersama. Administrasi publik yakni langkah menyusun dan penyalarsan SDM untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan manajemen kebijakan negara yang sudah dirumuskan (Chandler dan Plano dalam Keban, 2014). Anggapan lain dari ilmu administrasi publik yaitu tujuannya untuk mensukseskan suatu lembaga, sumber daya alam, dan fiskal untuk menyelesaikan masalah negara.

Terdapat berbagai jenis varian dalam maksud administrasi publik, antara lain *administration of public*, *administration for public* dan *administration by public*. Warga sebagai posisi dan pihak yang tidak aktif artinya wajib patuh atas seluruh hukum yang diformulasikan pemerintah yang memiliki peranan sebagai kelompok yang memiliki kuasa untuk mempengaruhi dan menggerakkan warga (*administration of public*). Pemerintah mempunyai peranan untuk menyuguhkan pelayanan sehingga pemerintah proaktif terhadap apa yang dibutuhkan warga (*administration for public*).

Tetapi dalam pandangan ini, pemerintah belum maksimal untuk melakukan pemberdayaan negara walaupun pelayanan dan apa yang dibutuhkan warga adalah target penting aktivitas pemerintah. Pemerintah menyuguhkan keleluasaan kepada warga untuk berdiri sendiri dan mengasah keahlian warga melalui pemberian fasilitas karena pemerintah sudah berupaya memberdayakan warga. Hal ini adalah ragam langkah pemerintah agar warga bisa mandiri dan

pemerintah bisa berorientasi kepada tugas negara yang lainnya yang tepat (*administration by public*).

Administrasi publik adalah rancangan yang luas sehingga belum mempunyai limitasi (Lemay dalam Keban, 2014). Administrasi publik ialah campuran teori dan penerapan yang mempunyai fokus untuk membagikan tupoksi pemerintah kepada warga dan memformulasikan kebijakan negara agar lebih responsif terhadap apa yang dibutuhkan warga lalu tahap pengelolaan dalam warga melalui tergapainya nilai nomatif. Terdapat konsep lain dari ahli tentang administrasi publik yaitu:

- a. Menurut Dimock dan Fox dalam (Keban, 2014), administrasi publik merupakan perencanaan dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat melalui produksi barang dan jasa. Sehingga administrasi publik sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan pelayanan publik.
- b. Menurut Barton dan Chappel dalam (Keban, 2014) mendefinisikan administrasi publik sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah atau *the work of government*. Maka dari itu, dalam memberikan pelayanan publik menganut aspek keterlibatan personil.
- c. Menurut Nigro dan Nigro dalam (Keban, 2014) administrasi publik merupakan suatu kerjasama kelompok pada lingkungan publik yang meliputi eksekutif, legislative dan yudikatif dimana ketiganya memiliki peran penting dalam memutuskan kebijakan publik sebagai kegiatan dari proses politik dan berbeda dengan administrasi swasta. Definisi ini menekankan proses lembaga

melalui kegiatan publik dalam usaha kerjasama kelompok yang berbeda dengan kegiatan swasta.

Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa definisi di atas, bahwa administrasi publik merupakan kerjasama antara organisasi atau kumpulan individu dalam menjalankan kewajiban atau peran pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pemerintah yaitu memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

Kemudian Ruang lingkup administrasi publik adalah tugas pemerintah yang makin rumit sejalan dengan masalah sosial yang makin rumit (Chandler dan Plano dalam Keban, 2014). Sehingga administrasi publik wajib berjalan sesuai dengan 6 dimensi strategis, yakni:

- a. Dimensi Kebijakan, yakni perlunya langkah formulasi kebijakan terbaik sehingga tahap bisa seimbang dengan metode kerja otak seseorang dimana menyuguhkan indikator terhadap suatu aktivitas.
- b. Dimensi Struktur Organisasi, yakni perlu aturan birokrasi, antara lain menciptakan departemen; pembagian peran; mendistribusikan kewenangan dan responsibilitas.
- c. Dimensi Manajemen, yakni menurut konsep manajemen melalui tahapan aktivitas yang sudah dikonsepskan bisa diterapkan (*actuating, organizing, dan controlling*).
- d. Dimensi Etika, yakni menyuguhkan indikator untuk ASN agar paham untuk memberikan opini terhadap keputusan yang positif dan negatif.
- e. Dimensi Lingkungan, yakni keadaan eksternal membawa pengaruh dimensi lain, antara lain birokrasi; pengolahan; kebijakan dan responsibilitas moral.

Keadaan tersebut, yaitu komposisi ekonomi; politik; budaya; teknologi; sosial yang bisa mempengaruhi pergerakan administrasi publik. Maka diperlukan keahlian yang adaptif terhadap perubahan.

- f. Dimensi Akuntabilitas Kerja, yakni perlunya responsibilitas dari ASN untuk menyuguhkan pelayanan sebagai wujud kinerja. Dimensi ini memperlihatkan peran pemerintah melalui fungsi administrasi publik.

Kesimpulannya adalah dimensi tersebut mempunyai korelasi sebab jika tidak terdapat 1 dimensi maka bisa terjadi penghancuran dan membawa pengaruh ke unsur lainnya. Sehingga perlunya sinergitas antar dimensi dengan terus melindunginya. Dimensi tersebut mendukung dalam rangka penelurusan masalah pada rancangan administrasi publik sehingga memperlancar ASN.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Suatu perkembangan disiplin ilmu dapat diindikasikan dari perubahan paradigma. Kuhn dalam (Keban, 2014) menjelaskan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang yang diikuti oleh suatu kelompok pada masa tertentu.

Paradigma 1 (1900-1926): Dikotomi Politik dan Administrasi. tokoh-tokoh yang berada dibelakang paradigma ini adalah Leonard D. White dan Frank J. Goodnow. Paradigma ini dikenal dengan sebutan paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Implementasi dalam paradigma ini yaitu administrasi harus dilihat sebagai suatu nilai yang bebas dan mengarah pada pencapaian nilai efisiensi dan ekonomi dalam birokrasi pemerintahan. Tetapi terdapat sisi negative dalam implikasi paradigma ini yaitu pembahasan hanya ditekankan pada lokus nya saja (birokrasi pemerintahan), sedangkan fokus atau cara metode apa yang tepat

untuk dikembangkan pada administrasi publik tidak dibahas secara lebih mendalam dan terperinci sehingga paradigma ini tidak berisi lengkap.

Paradigma 2 (1927-1937): Prinsip-prinsip Administrasi. Tokoh terkenal pada paradigma ini adalah Willoughby dan Gullick dan Urwick yang dipengaruhi oleh Fayol dan Taylor memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai focus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*) yang bersifat universal. Karena anggapan tersebut, membuat mereka tidak menjelaskan mengenai lokus dari administrasi publik. Maka dari itu, paradigma ini focus lebih ditekankan dari pada locusnya.

Paradigma 3 (1950-1970): Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik. John Gaus menyatakan bahwa teori dalam ilmu administrasi publik sama juga dengan teori politik sehingga muncullah paradigma baru yang beranggapan administrasi publik sebagai suatu ilmu politik yang lokusnya terletak pada birokrasi pemerintah sedangkan fokusnya menjadi tidak jelas akibat dari banyaknya kelemahan yang ada pada prinsip-prinsip administrasi publik. Sehingga terjadilah krisis identitas bagi administrasi publik karena ilmu politik memegang peran dominan dalam berjalannya ilmu administrasi publik.

Paradigma 4 (1956-1970): Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Dalam paradigma ini, prinsip-prinsip manajemen dikembangkan kembali secara ilmiah dan mendalam dan menjadi fokus dari paradigma ini. Fokus dari paradigma ini yaitu meliputi prinsip-prinsip seperti perilaku organisasi, metode kuantitatif, analisis manajemen, analisis system, dan lain-lain lebih dikembangkan

secara mendalam. Seluruh fokus yang dikembangkan ditujukan agar supaya dapat diterapkan baik di dunia bisnis maupun dunia administrasi publik sehingga menyebabkan keberadaan lokus menjadi samar.

Paradigma 5 (1970-sekarang): Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Administrasi publik telah memiliki fokus dan lokus yang jelas dalam paradigma ini. Fokusnya adalah teori manajemen; kebijakan publik; dan teori organisasi, sedangkan lokusnya adalah masalah dan kepentingan publik.

1.5.4 Manajemen Publik

Manajemen memiliki berbagai istilah tergantung dari latar belakang pendidikan, pengalaman, atau perspektif yang dianut oleh para ahli. Manajemen dan organisasi adalah sarana dari administrasi. Manajemen terdapat pada setiap tingkatan organisasi, sebab manajemen berperan dalam mengkoordinasi dan mengarahkan semua kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan organisasi merupakan tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan administrasi.

Menurut Hariani (2013), manajemen yaitu penggapaian tujuan suatu lembaga melalui penggerakkan SDM untuk melakukan fungsi dengan tidak melakukannya mandiri tanpa sepengetahuan pimpinan. Manajemen yakni penggapaian tujuan yang sudah ditetapkan melalui tahapan menyusun rencana, melakukan organisasi, melakukan arahan, dan mengawasi SDM lalu memanfaatkan sumber dayanya.

Manajemen merupakan keahlian untuk membuahkan hasil dalam menggapai tujuan melalui aktivitas orang lain (Sondang P. Siagian dalam (Hariani, 2013). Menurut Terry (2019), manajemen merupakan sistem tahapan untuk menggapai hasil melalui penggunaan SDM dan sumber daya lain yang terbagi atas menyusun rencana, melakukan organisasi, melakukan penggerakan, dan melakukan kendali.

Berbagai definisi manajemen tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan tanggungjawab seseorang dan kegiatan untuk merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, mengawasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam proses menjalankan suatu organisasi guna mencapai tujuan organisasi secara optimal.

Manajemen memiliki beberapa fungsi, salah satu ahli yang menguraikan fungsi-fungsi manajemen adalah George R. Terry. Menurutnya, manajemen terdapat empat fungsi, antara lain (Terry, 2019):

- a. *Planning* (Perencanaan), yakni proses penetapan tujuan yang ingin dicapai dan penetapan kegiatan yang perlu dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang harus dilakukan secara terus-menerus, sebab perencanaan merupakan kegiatan yang tidak pernah berhenti.
- b. *Organizing* (Pengorganisasian), merupakan kegiatan mengkoordinasikan individu atau kelompok melalui proses pengelompokan; menentukan kegiatan; dan memberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pencapaian rencana atau tujuan.

- c. *Actuating* (Pengarahan), merupakan proses menumbuhkan motivasi dan membimbing karyawan supaya karyawan tersebut bekerja dengan optimal dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam fungsi manajemen ini, manajer harus bisa mempengaruhi; membuat komitmen dan memotivasi guna mendukung tercapainya tujuan agar karyawan melakukan hal-hal yang diinginkan atau sesuai yang diinginkan demi mencapai tujuan organisasi.
- d. *Controlling* (Pengawasan), yakni memastikan apa yang telah dikerjakan dengan memeriksanya. Kegiatan ini juga membuat manajer cermat terhadap suatu masalah sebelum masalah tersebut menjadi semakin serius. Salah satu fungsi yang penting dalam sebuah organisasi adalah pengawasan, sebab apabila tidak ada fungsi pengawasan maka fungsi lainnya tidak akan optimal. Mengevaluasi dan memperbaiki apa yang sedang dikerjakan merupakan kegiatan dalam pengawasan. Maka dari itu, tujuan dari pengawasan adalah guna memastikan apakah rencana sudah berjalan dengan baik, serta guna menjamin ketercapaian hasil sesuai dengan rencana. Selanjutnya hasil dari fungsi pengawasan digunakan sebagai acuan atau dasar perumusan rencana kedepan.

Adapun fungsi-fungsi manajemen tersebut memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain dalam kegiatan manajemen pada suatu organisasi.

Manajemen publik (*public management*) dan kebijakan publik (*public policy*) merupakan dua bidang administrasi publik yang saling bertumpukan. Namun untuk membedakan, manajemen publik merupakan proses menggerakkan

sumber daya manusia dan non manusia sesuai “perintah” kebijakan publik. Manajemen publik menurut Overman dalam (Pasolong, 2014) adalah gabungan antara fungsi manajemen dan aspek-aspek umum organisasi di satu sisi, serta dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain.

Menurut Shafritz dalam (Wijaya, 2014), manajemen publik merupakan ilmu pada administrasi publik yang membahas mengenai restrukturisasi organisasi dan desain program, alokasi sumber daya melalui sistem penganggaran; manajemen keuangan; manajemen sumberdaya manusia dan mengevaluasi program. Selain itu, Lynn dalam (Wijaya, 2014) juga menggambarkan manajemen publik sebagai seni, ilmu dan profesi. Dimana yang dimaksud manajemen publik sebagai seni bahwa manajemen publik merupakan suatu kegiatan yang fleksibel dan bergantung pada situasi dan kondisi dimana ia beroperasi karena manajemen publik merupakan seni yang tidak dapat dihitng. Kemudian manajemen publik sebagai ilmu dikarenakan manajemen publik membutuhkan analisis sistematis melalui interpretasi dan eksplanasi. Serta manajemen publik sebagai profesi merupakan sekelompok orang yang mendedikasikan dirinya pada ilmu manajemen publik.

1.5.5 Pembangunan Berbasis Masyarakat

1.5.5.1 Pembangunan

Isi tinjauan perubahan di dalamnya terdapat prinsip pembangunan. Langkah menyelesaikan kehidupan warga dari kondisi yang buruk ataupun untuk menyelesaikan yang sudah sejahtera menjadi lebih sejahtera secara berkelanjutan adalah arti dari pembangunan. Artinya, pembangunan dimaknai dengan ragam

perubahan yang memiliki sifat terencana, sehingga untuk mencapai tujuan ini perlu adanya penyusunan rencana. Menurut Riyadi dalam (Aprillia Theresia et al., 2014) mengenai pembangunan itu sendiri merupakan suatu usaha demi tercapainya kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat yang memiliki kemauan dalam melaksanakan pembangunan itu. Akan tetapi menurut Goulet dalam (Aprillia Theresia et al., 2014), kesejahteraan yang dimaksud di sini merupakan nilai-nilai seperti tercapainya swasembada; peningkatan harga diri; serta kebebasan masyarakat dalam berkembang.

Pembangunan merupakan langkah transformasi warga dari keadaan kepada keadaan yang diharapkan; ada dua langkah transformasi, yakni terus-menerus (*continuity*) dan transformasi (*change*). Dua hal tersebut membentuk pergerakan dalam perkembangan warga. Pembangunan yakni aktivitas dari, oleh, dan untuk warga dimana melibatkan warga mulai dari mengambil kebijakan ke implementasi dan pengawasan aktivitas, serta memanfaatkan *output* oleh warga. Pembangunan dilaksanakan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, bukan kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat (Aprillia Theresia et al., 2014). Dari berbagai pengertian pembangunan dapat menunjukkan arahan bahwa:

- a. Pembangunan, yakni langkah yang dilaksanakan oleh sejumlah aktor guna meningkatkan kualitas hidup warga dan kelompoknya secara berkelanjutan;
- b. Aktivitas pembangunan menggunakan IPTEK terbaik ataupun bermanfaat untuk menggapai hasil yang diharapkan;

- c. Tujuan tersebut di atas mengandung arti bahwa wawasan mengenai cara memecahkan permasalahan yang sudah terjadi oleh aktor pembangunan.

Terdapat pelaku-pelaku dalam pembangunan yang pada dasarnya dibagi menjadi dua sub-sistem menurut Rahim dalam (Aprillia Theresia et al., 2014), antara lain:

1. Anggota organisasi penduduk yang memformulasikan rencana dan wajib untuk melakukan organisir serta melakukan penggerakan penduduk lain untuk terlibat di pembangunan. Memformulasikan gagasan atau opini tersebut diinginkan semua penduduk melalui prosedur yang disepakati.
2. Seluruh warga yang aktif terlibat dalam langkah pembangunan memiliki peran dalam menawarkan gagasan, implementasi aktivitas, mengawasi, dan melakukan penggunaan *output* pembangunan. Nyatanya, penyelenggara inti aktivitas pembangunan adalah isinya dari organisasi ini, sedangkan organisasi “warga golongan atas” atau “elit masyarakat” hanya memiliki peran untuk menerjemahkan peraturan dan rencana pembangunan, ditambah melakukan organisir serta penggerakan partisipasi warga.

1.5.5.2 Pembangunan Berbasis Masyarakat

Pembangunan berbasis masyarakat yakni pembangunan apa yang dibutuhkan warga dengan penggunaan kekayaan sumber daya yang tersedia yang dilakukan sesuai rencana dan dilakukan oleh warga, serta bisa digunakan oleh warga sekitar. Sehingga, pembangunan ini perlu diawali berdasarkan apa yang dibutuhkan warga itu dan tidak diformulasikan dari warga golongan atas yang

merasa tau dan lebih pintar untuk memformulasikan pembangunan yang sesuai untuk warganya. Pembangunan ini terdiri dari:

- a. Pembangunan dari atas dan atau dari bawah;
- b. Pembangunan berbasis sumberdaya-lokal;
- c. Pembangunan berbasis modal sosial;
- d. Pembangunan berbasis kebudayaan;
- e. Pembangunan berbasis kearifan lokal;
- f. Pembangunan berbasis modal spiritual.

Moeljarto Tjokrowinoto dalam (Aprillia Theresia et al., 2014) mengemukakan ciri-ciri pembangunan berbasis masyarakat, antara lain langkah mengambil keputusan wajib didasarkan pada warganya; menambahkan keahlian warga dalam pengelolaan sumber daya untuk pemenuhan apa yang dibutuhkan adalah faktor intinya; memiliki sifat adaptif dengan keadaan sekitar; penekanan tahap *social learning* terdiri dari koordinasi antar birokrasi dan kelompok kepentingan; pembentukan jejaring antar birokrasi dan LSM untuk penambahan keahlian masing-masing; pengidentifikasian dan pengelolaan seluruh kapasitas ataupun penjagaan yang seimbang secara tegak dan horizontal.

Terdapat komponen penting dalam pembangunan manusia menurut Mahbub UI Haq dalam (Aprillia Theresia et al., 2014), yaitu:

1. Kesetaraan dalam memperoleh kesempatan seperti kesetaraan akses, tidak harus kesetaraan hasil;
2. Pembangunan manusia dianggap sudah berhasil apabila akses kesempatannya sama, meskipun hasilnya berbeda;

3. Keberlanjutan atau *sustainability* dipahami bahwa generasi yang akan datang harus bisa menikmati kesempatan yang sama dengan generasi sekarang dalam memanfaatkan sumber daya secara memadai;
4. Produktifitas, dibutuhkan investasi terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi makro dalam mengembangkannya;
5. Pemberdayaan, dimana masyarakat mempunyai pilihan untuk kepentingannya sendiri sehingga mereka dapat mengambil keputusan terkait dengan hidup mereka.

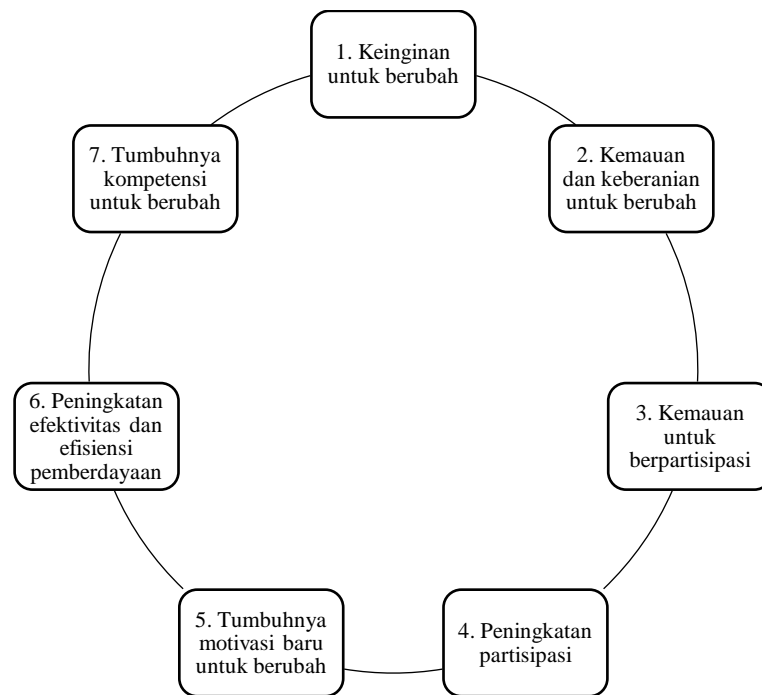
1.5.5.3 Tahapan Pembangunan Berbasis Masyarakat

Perubahan yang terencana oleh Lippit (1961) dalam (Aprillia Theresia et al., 2014), merinci tahapan kegiatan pembangunan berbasis masyarakat menjadi tujuh kegiatan utama, yaitu:

1. Penyadaran, ialah aktivitas menggugah warga akan keberlangsungannya, secara mandiri ataupun sebagai bagian dari warga, dan keadaan lingkungan yang terkait lingkungan fisik, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Langkah ini sebagai fungsi inti dari masing-masing aktivitas edukasi dan sosialisasi (Freire, 1976 dalam (Aprillia Theresia et al., 2014)).
2. Memperlihatkan terjadinya permasalahan, yakni keadaan yang tidak diharapkan mengenai: kondisi kapasitas, lingkungan fisik, politik, dan sosial budaya. Khususnya guna memperlihatkan permasalahan yaitu faktor pendorong adanya permasalahan, khususnya yang terkait kekurangan didalam dan diluar.

3. Mendukung penyelesaian permasalahan, dari kajian inti permasalahan, kajian pintasan penyelesaian permasalahan, serta memilih pintasan penyelesaian yang paling baik yang bisa dilaksanakan sejalan dengan keadaan di dalam (*strenght dan weakness*) serta keadaan diluar (*opportunity dan threat*) yang terjadi.
4. Memperlihatkan urgensitas transformasi yang lagi terjadi dan di masa depan, baik di internal kelompok dan warga. Dikarenakan keadaan lingkungan (didalam dan diluar) yang semakin bertransformasi cepat, warga juga wajib sedia mitigasi transformasi itu melalui aktivitas "*planned change*" ataupun transformasi yang sistematis.
5. Melaksanakan simulasi untuk bagian dan penerapan dari transformasi sistematis yang sudah sukses diformulasikan. Simulasi ini perlu, karena tidak seluruh inovasi selalu sejalan dengan keadaan warga. Lalu, simulasi wajib dilihat untuk mendapatkan deskripsi pintasan yang membawa manfaat dengan kegagalan yang minimal.
6. Menghasilkan dan membagikan pengumuman, baik dari eksternal (kajian, program, wirausahawan, lainnya) ataupun dari internal (apa yang dilalui, IPTEK, dan kekayaan budaya serta nilai adat). Sejalan dengan canggihnya IPTEK, barang, dan sarana distribusi yang dipakai wajib dijalankan sesuai dengan ciri khas wakil yang menerima sosialisasi.
7. Melakukan Pembangunan Berbasis Masyarakat, yakni pemberian peluang untuk organisasi marjinal untuk beropini dan memilih secara mandiri (*voice and choice*) terkait dengan: keterbukaan pengumuman, keikutsertaan dalam

memenuhi apa yang dibutuhkan dan keterlibatan pembangunan secara menyeluruh, langkah, tanggung jawab negara, dan diperkuatnya sumber daya daerah.



Gambar 1. 1 Siklus Pembangunan Berbasis Masyarakat Menurut Wilson

Sumber: Buku Pembangunan Berbasis Masyarakat, diolah peneliti

Siklus Pembangunan Berbasis Masyarakat Menurut Wilson dalam (Aprillia Theresia et al., 2014) yang pertama adalah menumbuhkan keinginan dalam diri untuk berubah dan berkembang, yang merupakan titik awal perlunya Pembangunan Berbasis Masyarakat. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan meningkatkan, segala upaya Pembangunan Berbasis Masyarakat yang dilakukan tidak akan mendapat perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat;

Kedua, menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan/atau hambatan yang dirasakan, untuk kemudian

mengambil keputusan untuk mengambil bagian dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan;

Ketiga, mengembangkan kemauan untuk berpartisipasi atau mengambil bagian dalam kegiatan Pembangunan Berbasis Masyarakat yang memberikan manfaat atau memperbaiki kondisi;

Keempat, meningkatkan peran atau partisipasi dalam kegiatan Community Based Development yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya;

Kelima, peningkatan peran dan loyalitas terhadap kegiatan Pembangunan Berbasis Masyarakat, yang ditunjukkan dengan tumbuhnya motivasi untuk berubah;

Keenam, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan Pembangunan Berbasis Masyarakat;

Ketujuh, meningkatkan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan Pembangunan Berbasis Masyarakat baru.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Peneliti mengemukakan konseptual untuk menuntun penelitian yang akan dilaksanakan berdasarkan kajian penelitian terdahulu dan teori-teori yang telah dipaparkan di atas untuk menyelesaikan penelitian dengan judul Pembangunan Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Bank Sampah Kencana. Pada penelitian ini, terdapat permasalahan yang mana masih rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan manfaat kegiatan bank sampah.

Dengan adanya penjelasan terhadap berjalannya Bank Sampah Kencana dan guna melihat pengelolaan bank sampah berbasis masyarakat yang efektif di Bank

Sampah Kencana serta mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi, maka peneliti akan menjelaskan pengelolaan bank sampah di Bank Sampah Kencana dengan melihat siklus pembangunan berbasis masyarakat, sebagai berikut:

1. Keinginan Kelompok Masyarakat Untuk Berubah.

Menumbuhkan keinginan dalam diri untuk berubah dan berkembang, yang merupakan titik awal perlunya Pembangunan Berbasis Masyarakat. Dalam hal ini peneliti ingin melihat peran Dinas Lingkungan Hidup dan Ketua Bank Sampah, dalam sosialisasi masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan berbasis masyarakat di Bank Sampah Kencana.

2. Kemauan dan Keberanian Kelompok Masyarakat Untuk Berubah

Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk kemudian mengambil keputusan untuk mengambil bagian dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan; dalam hal ini peneliti ingin melihat dampak sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Ketua Bank Sampah kepada masyarakat lingkungan sekitar bank sampah.

3. Kemauan Kelompok Masyarakat Untuk Berpartisipasi

Mengembangkan kemauan untuk berpartisipasi atau mengambil bagian dalam kegiatan Pembangunan Berbasis Masyarakat yang memberikan manfaat atau memperbaiki kondisi, dalam hal ini peneliti ingin melihat perubahan yang dilakukan masyarakat setelah Dinas Lingkungan Hidup dan Ketua Bank Sampah mengajak masyarakat lingkungan sekitar bank sampah untuk berpartisipasi.

4. Peningkatan Partisipasi Kelompok Masyarakat

Meningkatkan peran atau partisipasi dalam kegiatan *Community Based Development* yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya; dalam hal ini peneliti ingin melihat peran dan partisipasi Dinas Lingkungan Hidup, Ketua bank sampah, dan masyarakat sekitar dalam melaksanakan pembangunan berbasis masyarakat.

5. Tumbuhnya Motivasi Baru Kelompok Masyarakat Untuk Berubah

Peningkatan peran dan loyalitas terhadap kegiatan Pembangunan Berbasis Masyarakat, yang ditunjukkan dengan tumbuhnya motivasi untuk berubah; dalam hal ini peneliti ingin melihat kelanjutan partisipasi dalam pembangunan berbasis masyarakat di Bank Sampah Kencana.

6. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pemberdayaan Pada Kelompok Masyarakat

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan Pembangunan Berbasis Masyarakat; dalam hal ini peneliti ingin melihat pencapaian yang sudah dilakukan oleh DLH, Ketua bank sampah, dan masyarakat sekitar dalam pembangunan berbasis masyarakat.

7. Tumbuhnya Kompetensi Kelompok Masyarakat Untuk Berubah

Meningkatkan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan Pembangunan Berbasis Masyarakat yang baru; dalam hal ini peneliti ingin melihat perubahan setelah dilakukannya partisipasi DLH, Ketua Bank Sampah

dan masyarakat sekitar terhadap pembangunan berbasis masyarakat di Bank Sampah Kencana.

1.7 Argumen Penelitian

Program bank sampah ini merupakan program yang digagas dan dicanangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dalam rangka meminimalisir timbulan sampah yang masuk ke TPA belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari masyarakat. Kesadaran dan tingkat partisipasi anggota dan nasabah bank sampah masih menjadi kendala terhadap berjalannya dan keberlanjutan program bank sampah. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat program ini sudah berjalan, akan tetapi dalam kegiatannya masih banyak masalah yang dihadapi terkait dengan proses dan pengembangan pembangunan berbasis masyarakatnya.

Dalam siklus kemauan untuk berubah, masyarakat masih enggan untuk mengubah kebiasaannya dalam mengumpulkan dan memilah sampah sebelum masuk ke TPA. Kemudian, kemauan untuk berpartisipasi masyarakat di Bank Sampah Kencana masih rendah yang dilihat dari perbandingan antara *catchmen area* di bank sampah dengan masyarakat yang telah menjadi nasabah di Bank Sampah Kencana. Lalu pada siklus peningkatan partisipasi, Bank Sampah Kencana belum memiliki nasabah sebanyak nasabah pada bank sampah lain di Kabupaten Semarang yang mana dapat menjadi pembanding peningkatan partisipasinya. Hal itu dapat diketahui bahwa peningkatan partisipasi pada Bank Sampah Kencana masih belum diperhatikan.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini akan melakukan analisis atas Pembangunan Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Bank Sampah Kencana berdasarkan siklus pembangunan berbasis masyarakat menurut Wilson. Informan dalam penelitian ini merupakan Ketua Bank Sampah Kencana, Pengurus Bank Sampah Kencana, Staf Ahli di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, Ketua RT 04 dan Nasabah Bank Sampah Kencana.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif menurut Bogdan dan Tylor dalam (Moleong, 2016), menghasilkan deskripsi data dalam bentuk verbal, serta perilaku yang dapat diamati. Mengingat penelitian ini akan meneliti mengenai Pembangunan Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Bank Sampah Kencana, maka dari itu penelitian ini dalam menjelaskan fenomena yang terjadi guna memberikan gambaran tentang fenomena yang terjadi di lapangan menggunakan deskriptif kualitatif.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Bank Sampah Kencana yang terletak di Perumahan Griya Argo Kencana, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang. Pemilihan tempat penelitian ini dikarenakan penelitian ini mengambil judul tentang “Pembangunan Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Bank Sampah Kencana, Kabupaten Semarang”. Mengingat Kabupaten Semarang juga merupakan salah satu daerah

yang memiliki masalah sampah di Indonesia dan dibentuknya Bank Sampah di wilayah Kabupaten Semarang, maka dari itu peneliti melakukan penelitian di salah satu Bank Sampah yang berada di kawasan menengah ke atas yaitu Bank Sampah Kencana.

1.8.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam memilih informan penelitian, yaitu dengan mencari sumber data kepada orang yang dianggap mengetahui secara detail mengenai topik penelitian. Informan tersebut akan diwawancari secara mendalam guna memberikan informasi dan menjawab permasalahan pada topik penelitian. Maka diputuskan bahwa pengambilan data akan dilakukan kepada subjek penelitian atau informan, yaitu Ketua Bank Sampah Kencana, Pengurus Bank Sampah Kencana, Staf Ahli di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, Ketua RT 04 dan Nasabah Bank Sampah Kencana.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang mana jenis data berupa teks, gambar dan dokumen yang mendukung pengumpulan data. Data kualitatif dalam penelitian ini merupakan gambaran umum objek penelitian guna mengetahui pembangunan berbasis masyarakat dalam upaya pengembangan bank sampah di Bank Sampah Kencana, Kabupaten Semarang.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber-sumber utama penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada kegiatan Bank Sampah Kencana, salah satunya dengan mengikuti kegiatan Bank Sampah pada Hari Minggu (minggu ke-4) di Perumahan Griya Argo Kencana dan dari informan utama atau informan melalui wawancara langsung, yaitu kepada Ketua Bank Sampah Kencana, Pengurus Bank Sampah Kencana, Staf Ahli di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, Ketua RT 04 dan Nasabah Bank Sampah Kencana.

Sedangkan data sekunder atau data tidak langsung diperoleh melalui pihak ketiga mengenai pembangunan berbasis masyarakat, partisipasi masyarakat, persampahan, program bank sampah dan pengelolaan sampah. Data sekunder diperoleh peneliti melalui literatur seperti jurnal; artikel; berita dalam situs-situs internet yang berkaitan dengan objek penelitian, serta dokumen terkait kegiatan bank sampah; foto atau gambar kegiatan bank sampah; arsip dokumen Bank Sampah Kencana; rekaman wawancara mengenai pembangunan berbasis masyarakat dalam upaya pengembangan Bank Sampah Kencana; serta melalui dokumen yang dimiliki oleh dinas terkait, seperti data *volume* timbulan sampah dan data sampah terangkut.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi mengharuskan peneliti pergi ke tempat kejadian untuk mengamati lalu menjelaskan fenomena, aktivitas dan orang-orang terlibat yang akan diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini melakukan pengamatan langsung di Bank Sampah Kencana dengan mengamati kegiatan Bank Sampah Kencana, salah satunya dengan mengikuti kegiatan Bank Sampah pada hari Minggu pada minggu keempat di Perumahan Griya Argo Kencana. Kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan berbasis masyarakat dalam upaya pengembangan Bank Sampah Kencana.

2. Wawancara

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) melalui pengajuan pertanyaan kepada narasumber yang mengerti tentang tema yang dikaji, dan dokumentasi dari rekaman audio, gambar, dan arsip tertulis pada narasumber yang menjadi pendukung data. Metode wawancara yang dipakai, yaitu pedoman wawancara (*interview guide*) yang dilaksanakan dengan persiapan apa yang akan ditanyakan sebagai *instrument* penelitian.

3. Dokumen

Dokumen dapat melengkapi metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015). Apabila mencantumkan dokumen pendukung seperti foto, hasil penelitian akan lebih kredibel. Akan tetapi, tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga perlu ditinjau ulang. Daftar hadir nasabah bank sampah, arsip dokumen Bank Sampah Kencana, data timbulan sampah, data hasil pengelolaan sampah dan

sebagainya, serta rekaman wawancara dan foto kegiatan bank sampah yang diperoleh langsung atau melalui informan yang terlibat dalam kegiatan pada Bank Sampah Kencana merupakan dokumen yang digunakan pada penelitian ini.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Setelah mengumpulkan data dengan berbagai cara yang telah ditempuh seperti yang dijabarkan di atas, kemudian seluruh data selama proses penelitian dideskripsikan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2015) sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data, yakni perangkuman data dengan pemilihan suatu yang utama sehingga bisa ditariknya kesimpulan akhir dan dapat divalidasi. Hal itu mempermudah untuk pengumpulan data berikutnya, yang mana data yang telah diproses itu bisa diberikan deskripsi yang rinci untuk penelitian. Peneliti memerlukan pengetahuan yang luas agar bisa melakukan pengembangan teori dan mereduksi nilai yang ditemukan dalam mereduksi data. Data-data yang telah didapatkan dari informan mengenai pembangunan berbasis masyarakat dalam upaya pengembangan Bank Sampah Kencana kemudian dipilih dan dirangkum supaya lebih jelas melalui pengembangan teori.

2. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian kualitatif, yakni dengan menyajikan data yang telah didapatkan dari informan mengenai pembangunan berbasis masyarakat dalam upaya pengembangan Bank Sampah Kencana dalam bentuk naratif

atau deskriptif disertai uraian singkat, tabel dan sebagainya. Data akan terorganisir dengan penyajian data, sehingga semakin mudah untuk dipahami apa yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah mereduksi dan menyajikan data, menarik kesimpulan merupakan langkah selanjutnya. Kesimpulan penelitian kualitatif mungkin menjawab, namun mungkin juga tidak. Sebab, masalah yang terkuak memiliki sifat tidak tetap dan bisa bertambah setelah dilaksanakan penelitian. Ditemukan yang belum pernah muncul ataupun menemukan yang baru adalah kesimpulan dari penelitian kualitatif.

1.8.8 Kualitas Data

Jika data yang didapatkan ketika penelitian sejalan dengan kondisi nyatanya di situs penelitian, maka bisa dinyatakan tepat guna. Teknik triangulasi yang dipakai di penelitian ini guna pengujian keabsahan data melalui peninjauan dari seluruh sumber menggunakan metode triangulasi yang dipakai. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan berbagai sumber penelitian. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi sumber dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan di lokasi penelitian dengan data hasil wawancara dengan informan.
- b. Membandingkan segala pandangan dan pendapat berbagai kalangan, seperti Ketua Bank Sampah Kencana, Pengurus Bank Sampah Kencana, Staf Ahli di

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, Ketua RT 04 dan Nasabah Bank Sampah Kencana.

- c. Membandingkan hasil wawancara setiap informan dan membandingkan dengan isi-isi dokumen yang berkaitan.